

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam administrasi negara hubungan hukum antara pemerintah dalam kapasitasnya selaku wakil dari badan pemerintahan, dengan seseorang atau badan hukum perdata tidak berada dalam kedudukan sejajar. Pemerintah memiliki kedudukan khusus sebagai satu-satunya yang disertai kewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan kepentingan umum dimana dalam rangka melaksanakan kewajiban ini kepada pemerintah diberikan wewenang membuat peraturan perundang-undangan, menggunakan paksaan pemerintahan, atau menerapkan sanksi-sanksi hukum.¹

Tindakan pemerintah dalam hukum publik bersifat unilateral. Dalam hal ini Pemerintah berwenang mengeluarkan ketetapan (*beschikking*). Salah satu jenis ketetapan adalah *Vergunning*. Untuk mengetahui secara lebih rinci dapat dibedakan antara Dispensasi, Izin dan Konsesi. Konsistensi pemakaian peristilahan ini penting untuk diikuti, untuk menghindari kesalahan pemahaman dari subyek pemakainya. Masing-masing memiliki kandungan maksud dan batasan pengertian secara definitif menurut hukum.²

Perbedaan antara ketiganya adalah tentang bagaimana sikap pembuat aturan hukum abstrak terhadap tingkah laku yang diatur. Pengertian sikap pembentuk aturan hukum abstrak (*regeling*) bukan pembentuk aturan hukum

¹ Jaka Susila, 2010, *Handout Hukum Administrasi Negara*, Surakarta: UMS, hal. 16

² Harun, 2009, *Konstruksi Perizinan Usaha Industri Indonesia Prospektif*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 13

konkret (*beschikking*). Hal ini semisal di tingkat Kabupaten/Kota yakni DPRD dan Bupati/Walikota terhadap tingkah laku yang perlu diatur. Dengan demikian bukan sikap Bupati/Walikota sebagai pembentuk ketetapan.³

Apabila pembuat peraturan secara umum tidak melarang suatu perbuatan asal dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku disebut izin atau suatu keputusan yang meniadakan larangan umum untuk tingkah laku khusus.⁴

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu.⁵

Izin adalah perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur. Menurut Sjachran Basah:

³ *Ibid.*, hal. 13-14

⁴ *Ibid.*, hal. 17

⁵ Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 168

“Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”⁶

Menurut N.M Spelt dan J.BJ.M Berge:

“Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberikan izin penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya”.⁷

Dalam rangka untuk menyelenggarakan kepentingan umum (kesejahteraan sosial), pemerintah diberi kewenangan untuk campur tangan (*staatsbemoeyenis*) dalam kehidupan masyarakat dalam batas-batas yang diperbolehkan menurut hukum. Oleh karena itu, pemerintah diberi kewenangan untuk membuat dan menggunakan Peraturan Perundang-undangan. Dengan kata lain pemerintah diberi kewenangan legislasi.⁸

Dalam kaitannya dengan kebijaksanaan pemerintah mengenai obat nasional, implementasi terkait kewenangan yang dimiliki pemerintah untuk campur tangan dalam kehidupan masyarakat dalam batas-batas tertentu ini salah satunya adalah dalam mengatur serta membina penggunaan sediaan farmasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan:

Ayat 3 : “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus

⁶ Sjachran Basah , 1995, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, Surabaya: FH UNAIR, hal. 4

⁷ Jaka Susila, *Op. Cit*, hal. 26

⁸ Jaka Susila, *Op. Cit*, hal. 17

memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah”.

Ayat 4 : “Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi dan pengedaran sebagaimana dimaksud ayat (3)”.

Sebagai salah satu bagian dari usaha kesehatan, maka usaha di bidang farmasi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menetapkan kebijaksanaan di bidang farmasi, serta melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan untuk tercapainya sasaran kebijaksanaan dan program tersebut. Pengadaan obat harus disertai adanya suatu sistem distribusi yang tepat dan efektif, sehingga produksi obat dapat efektif dan obat dapat disalurkan secara tepat dan merata ke seluruh lapisan masyarakat.⁹

Dasar hukum terkait izin bagi pedagang eceran obat ini adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 Tentang Pedagang eceran obat, serta karena penelitian ini mencakup wilayah Kota Surakarta maka berdasar pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perizinan Sarana dan Bidang Kesehatan.

⁹ Midian Sirait, 2001, *Tiga Dimensi farmasi*, Jakarta: Mahardika, hal. 55-64

Pedagang Eceran obat menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 Tentang Pedagang eceran obat adalah menjual obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan ini juga dijelaskan bahwa pemberian izin Pedagang eceran obat dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Sementara itu pengertian Pedagang eceran obat menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perizinan Sarana dan Tenaga Bidang Kesehatan adalah Orang atau Badan hukum yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin.

Maka dalam hal ini izin bagi Pedagang eceran obat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perizinan Sarana dan Tenaga Bidang Kesehatan hanyalah terbatas dapat menjual obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas. Disamping obat-obat dari daftar W dan G, masih terdapat dua jenis obat yang biasa dibeli tanpa resep, yakni obat-obat wajib apotik dan obat-obat daftar F, yang juga sering disebut obat OTC (*over the counter Drug*) atau obat bebas.¹⁰ Obat daftar W, juga disebut daftar obat keras bebas terbatas, mengandung “obat-obat terhadap jenis-jenis penyakit yang pengobatannya dianggap telah dapat ditetapkan sendiri oleh

¹⁰ Kesehatan Keluarga.net, Minggu, 07 April 2013 : *Jenis Obat yang Bisa Dibeli Tanpa Resep Dokter*, dalam <http://kesehatankeluarga.net/jenis-obat-yang-bisa-di-beli-tanpa-resep-dokter-298.html>, diunduh Minggu, 20 Oktober 2013 Pukul 23.33 WIB

rakyat banyak dan tidak begitu membahayakan, terlebih jika diminum menurut aturan pemakaiannya”. W adalah singkatan dari bahasa belanda *Waarschuwing* yang artinya peringatan. Dalam daftar W termasuk antara lain obat asma efedrin (sampai 35 mg), sulfa usus (500 mg) dan antihistaminika untuk pemakaian luar. Obat-obat bebas terbatas itu dapat dibeli tanpa resep di apotik dan toko obat . penyerahannya oleh toko obat harus dalam kemasan aslinya guna mencegah pemalsuan, dan/atau penukaran, beserta suatu tanda peringatan W.¹¹

Perizinan merupakan salah satu dari pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Seiring dengan perkembangan pemerintahan di daerah, maka berbagai jenis pelayanan pun mengalami perkembangan pula. Ada daerah yang memiliki jenis pelayanan yang sedikit, namun ada pula daerah yang memiliki jenis pelayanan yang relatif banyak. Setiap pemerintah daerah memiliki jenis pelayanan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas yang dihadapi oleh masing-masing daerah. Lembaga pelayanannya pun berbeda-beda, baik penyelenggara maupun nama dan bentuk dari lembaga penyelenggara pelayanan. Ada pelayanan yang masih dilakukan oleh dinas-dinas atau kantor-kantor teknis, tetapi ada pula pelayanan publik yang telah memiliki lembaga pelayanan tersendiri.¹²

Secara teknis Perizinan bagi Pedagang eceran obat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang

¹¹ Kesehatan Keluarga.net, Sabtu, 06 April 2013 : *Obat yang Masuk Daftar W*, dalam <http://kesehatankeluarga.net/artikel/contoh-obat-daftar-w>, diunduh Minggu, 20 Oktober 2013 Pukul 23.45 WIB

¹² Hardiyansyah, 2011, *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi dan Implementasinya*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, hal. 74

Perizinan Sarana dan Tenaga Bidang Kesehatan pelayanan perizinannya merupakan kewenangan dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Izin bagi Pedagang Eceran obat tersebut adalah Izin Pedagang Eceran Obat.

Perizinan terhadap Pedagang Eceran Obat dilakukan dengan penerbitan Surat Izin Pedagang Eceran Obat. Izin ini merupakan salah satu dari jenis Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan. Dalam hal ini untuk mengajukan Izin Pedagang Eceran Obat di Kota Surakarta dilakukan di Dinas Kesehatan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Perda Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perizinan Sarana dan Tenaga Bidang Kesehatan.

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Salah satu fungsi dari Dinas Kesehatan adalah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan lingkup Kabupaten/Kota.¹³

Dalam Peraturan Daerah tersebut dapat diketahui bahwa artinya Pedagang eceran obat termasuk dalam sarana bidang kesehatan dan termasuk dalam izin penyelenggaraan sarana kesehatan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang atau badan hukum harus memiliki izin untuk menjual obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas.

Berdasarkan pengamatan sementara penulis terhadap para Pedagang Obat baik Pedagang kelontong yang juga menjual obat, minimarket maupun

¹³ Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara, 2012, *Dinas kesehatan*, dalam <http://www.kayongutarakab.go.id/2012/index.php/dinas-daerah/dinas-kesehatan>, diunduh Senin, 18 Nopember 2013 Pukul 09.00 WIB

toko yang menjual obat di Kota Surakarta masih ada yang menjual tanpa ada Izin Pedagang Eceran Obat dari Dinas Kesehatan. Oleh karena itu artinya masih ada masyarakat yang belum melakukan izin untuk menjual obat-obatan. Kemudian muncul pertanyaan sebenarnya bagaimana pelaksanaan perizinan bagi pedagang eceran obat ini karena tidak semua pedagang obat menjual obat dengan izin. Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan mengenai bagaimanakah Pelaksanaan Perizinan Toko Obat agar Pedagang Eceran obat dalam menjual obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas menjadi legal. Bagaimanakah Pelaksanaan Perizinan Toko Obat bagi Pedagang eceran obat? Kemudian Bagaimanakah Hambatan dalam pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Toko Obat bagi Pedagang Eceran obat di Kota Surakarta ?.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **Pelaksanaan Perizinan Pedagang Eceran Obat di Kota Surakarta**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perizinan Pedagang Eceran Obat di Kota Surakarta ?
2. Bagaimana Hambatan dalam pelaksanaan Perizinan Pedagang Eceran Obat di Kota Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Perizinan Pedagang Eceran Obat di Kota Surakarta.
2. Untuk mendeskripsikan Hambatan dalam pelaksanaan Perizinan Pedagang Eceran Obat di Kota Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian biasanya dibagi dua, yakni kegunaan akademik atau kegunaan teoretis, yakni kegunaan penelitian yang sifatnya sumbangsih bagi pengayaan pengetahuan atau literer bagi kepentingan akademik dan penguatan teori tertentu. Kegunaan penelitian yang kedua adalah kegunaan praktis, yakni kegunaan yang sifatnya sumbangsih bagi kepentingan di luar akademik atau teoretis.¹⁴

Nilai dari suatu penelitian dapat dilihat dari manfaat yang dapat diberikan. Adapun manfaat yang akan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan teori hukum terkait dengan Perizinan terhadap pedagang eceran obat.

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 156

2. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai Perizinan terhadap pedagang eceran obat di Kota Surakarta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 Tentang Pedagang eceran obat dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perizinan Sarana dan Tenaga Bidang Kesehatan.

E. Kerangka Pemikiran

Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya, kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi seluruhnya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara. Ide sentral negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya

undang-undang dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan.¹⁵

Secara teori, negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu, dan agar semuanya berjalan menurut hukum.¹⁶

Tugas pemerintahan dalam negara hukum modern (*Welfare state*) seperti sekarang ini tidak hanya melaksanakan undang-undang saja, tetapi lebih luas dari itu yaitu menyelenggarakan kepentingan umum. Negara Kesejahteraan (*Welfare state*) dituntut harus selalu dapat bertindak untuk menyelesaikan segala aspek atau persoalan yang menyangkut kehidupan warga negaranya, meskipun dalam penyelesaiannya belum ada peraturan yang mengaturnya.¹⁷

Dalam kaitannya dengan Negara Hukum Kesejahteraan (*Welfare state*) maka terdapat kebebasan dari negara untuk melakukan tindakan atau turut serta dalam persoalan-persoalan yang terjadi pada kehidupan warga negara. Tindakan untuk menghadapi persoalan ini dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat tidak mungkin untuk dihindari. Oleh karena itu dalam praktek tindakan-tindakan semacam ini akan diambil oleh penguasa-penguasa yang bersangkutan sesuai dengan kebijaksanaannya sendiri. Wewenang untuk mengambil tindakan sesuai dengan kebijaksanaan

¹⁵ Murtir Jeddawi, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Total Media, hal. 34-36

¹⁶ Murtir Jeddawi, *Op.Cit*, hal. 28

¹⁷ Hartono Hadisoeperto, 2008, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hal. 71

penguasanya sepanjang hal itu belum ada pengaturannya disebut *Freies Ermessen*.¹⁸

Izin (*Vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.¹⁹

Pengertian Pedagang Eceran Obat menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perizinan Sarana dan Bidang Kesehatan adalah Orang atau Badan Hukum yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan onat-obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin²⁰. Pengertian Pedagang eceran Obat ini mengacu pada bentuk usahanya yaitu Toko Obat. Pengertian Toko Obat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah Sarana yang memiliki Izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran²¹.

¹⁸ Jaka Susila, *Loc. Cit*

¹⁹ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hal. 167-168

²⁰ Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perizinan Sarana dan Bidang Kesehatan

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian

F. Metode Penelitian

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan. Suatu usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.²²

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka penelitian menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.²³

Sehingga dengan metode penelitian sosiologis ini diketahui apakah Pelaksanaan Perizinan terhadap Pedagang Eceran obat di Kota Surakarta telah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 Tentang Pedagang eceran obat dan Peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perizinan Sarana dan Tenaga Bidang Kesehatan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif,

²² Sutrisno Hadi, 1997, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: UGM Press, hal. 3

²³ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 16

dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²⁴

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.²⁵

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan mengenai bagaimana Pelaksanaan perizinan bagi pedagang eceran obat di Surakarta sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan tentang Perizinan bagi Pedagang eceran obat.

3. Jenis Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan, dalam hal ini diperoleh dengan wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

²⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hal. 10

²⁵ Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hal. 9

²⁶ Soetrisno Hadi, 1986, *Metodologi Research Jilid II*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, hal. 26

Data sekunder terdiri atas Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun yang digunakan sebagai bahan hukum primer yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 167/KAB /B.VIII/1972 Tentang Pedagang Eceran Obat, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1331/Menkes/ SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 Tentang Pedagang Eceran Obat, Perda Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perizinan Sarana dan Tenaga Bidang Kesehatan, Peraturan Perundangan lain yang menyertainya, bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer , seperti dokumen yang berisi informasi, artikel dan hasil penelitian yang berkaitan dengan perizinan, bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan secara langsung dan relevan dalam penelitian ini diperlukan adanya suatu teknik pengumpulan data yang tepat. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hal.32

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian untuk menemukan konsepsi-konsepsi atau teori-teori dengan menelaah buku-buku literatur, laporan dan lainnya. Bahan pustaka ini dapat merupakan bahan primer ataupun bahan sekunder, di mana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis-jenis yang berlainan.²⁸

b. Studi Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara mempelajari objek yang akan diteliti secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan

1) Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan skripsi ini penulis mengambil lokasi penelitian di Dinas Kesehatan Kota Surakarta adapun alasan penulis memilih lokasi di Kota Surakarta yaitu karena penulis tinggal di Kota Surakarta.

2) Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subyek adalah Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang mempunyai kewenangan menerbitkan Surat Izin Pedagang Eceran Obat berdasarkan Perda Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perizinan Sarana dan Tenaga Bidang Kesehatan. Dalam penelitian ini, penulis lebih khusus meneliti mengenai perizinan terhadap

²⁸ Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hal. 50

pedagang eceran obat dan obyek penelitiannya adalah pelaksanaan Izin bagi Pedagang Eceran obat yang dilakukan oleh Subyek.

Dalam hal ini studi lapangan yang akan dilakukan penulis dengan cara sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh data informasi dengan bertanya langsung kepada responden tentang segala sesuatu yang dibutuhkan dalam penelitian. Wawancara langsung ini bersifat wawancara tidak berstruktur dimana wawancara yang diajukan bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.²⁹

Responden yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah Kassi Kefarmasian, Makanan dan Minuman Bidang Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Surakarta.

2) Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan purpose sampling, tidak semua responden diwawancarai akan tetapi hanya responden yang mempunyai pengetahuan tentang Perizinan Sarana Bidang

²⁹ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, hal. 140

Kesehatan dan Izin Perdagangan terkait mengenai Perizinan bagi Pedagang eceran obat di Kota Surakarta.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan analisa data yang meliputi Peraturan perundang-undangan, literatur serta ketentuan yang ada kaitannya dengan Perizinan Sarana Bidang Kesehatan kemudian dihubungkan dengan pendapat responden dan data di lapangan.

Data-data yang telah didapat tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif setelah itu dilakukan pemecahan masalahnya serta kesimpulan untuk menjawab perumusan masalah.

G. Sistematika Skripsi

Penelitian skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika skripsi ini adalah:

BAB I adalah pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II adalah tinjauan pustaka yang akan memberikan kajian-kajian teoritis mengenai dasar negara hukum dan kebijakan tata usaha negara, perizinan pedagang eceran obat, pedagang eceran obat, peraturan perundang-

undangan mengenai perizinan bidang kesehatan dan penegakan hukum di masyarakat.

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang pelaksanaan perizinan pedagang eceran obat di wilayah Kota Surakarta dan hambatan dalam pelaksanaan perizinan pedagang eceran obat di Kota Surakarta.

BAB IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran bagi pihak yang berkaitan dengan penulisan ini.